



DIALEKTIKA ASWAJA DAN KEBERAGAMAN BERAGAMA: STUDI PRAKTIK TOLERANSI DI MASYARAKAT MULTIKULTURAL

ASWAJA DIALECTICS AND RELIGIOUS DIVERSITY: A STUDY OF TOLERANCE PRACTICES IN MULTICULTURAL SOCIETY

Akmir¹, Fahrani², Tenri Bayang³, Sutriani⁴, Wilda⁵

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: akmirakmir@gmail.com¹, fahraniusmann693@gmail.com², tenribayang015@gmail.com³, sutrianiandini9@gmail.com⁴, whhisana@gmail.com⁵

Article Info

Article history :

Received : 29-12-2025

Revised : 30-12-2025

Accepted : 02-01-2026

Published : 04-01-2026

Abstract

The purpose of this study is to explore the behavioral of society and the role of local actors in establishing a tolerant community life in Pancasila Village, to identify the challenges in implementing tolerance practices and the solutions to overcome them, and to examine the implications of tolerance practices for ideological resilience. This research used a qualitative descriptive approach, conducted in Wonorejo Village, Banyuputih Subdistrict, Bondowoso Regency, East Java Province. Data were collected through in-depth interviews with the Village Head, the Hamlet Head, and two community leaders, documentation through related photos and documents, and direct observations at the research site. Data analysis was carried out using the interactive data analysis model consisting of data collection, data condensation, data presentation, and concluding drawing. The results indicate that the local actors, such as village government and community leaders, play a significant role in accommodating diversity and encouraging mutual respect among religious communities, thus strengthening tolerance in everyday life. Challenges include skepticism in religious practices, family conflicts related to different religious beliefs, and the limited implementation of religious ceremonies. The solutions implemented involve strengthening dialogue and openness within families to accept religious differences as part of social interaction. The implementation of religious values, humanity, unity, democracy, and justice contributes to strong ideological resilience in Pancasila Village.

Keywords: *Religious Tolerance; Pancasila Village; Ideological Resilience*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perilaku masyarakat serta peran aktor lokal dalam mewujudkan kehidupan toleransi di Desa Pancasila, Mengidentifikasi kendala dalam penerapan praktik toleransi serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, dan mengetahui implikasi praktik toleransi terhadap ketahanan ideologi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan berlokasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Kepala Dusun, dan dua tokoh masyarakat, dokumentasi berupa foto dan dokumen terkait, serta observasi langsung di lokasi penelitian. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dan tokoh masyarakat berperan penting dalam mengakomodasi keberagaman dan menumbuhkan sikap saling menghargai antarumat beragama, sehingga praktik toleransi terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Kendala yang muncul antara lain sikap skeptis dalam ibadah, konflik keluarga terkait perbedaan agama, serta keterbatasan pelaksanaan upacara keagamaan. Solusi



yang dilakukan berupa penguatan dialog dan keterbukaan dalam keluarga untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan sosial. Implementasi nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan keadilan menjadikan masyarakat Desa Pancasila memiliki ketahanan ideologi yang kuat.

Kata Kunci: Toleransi Beradama; Desa Pancasila; Ketahanan Ideologi

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki suku, agama, ras, dan budaya, sehingga negara ini disebut multikultural (Nuryadi et al., 2020). Para pendiri bangsa menetapkan Pancasila dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* sebagai dasar negara untuk menyatukan berbagai perbedaan tersebut (Widiatmaka et al., 2021). Nilai-nilai pancasila – religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan keadilan, disebut sebagai kepribadian bangsa yang harus dibumikan untuk mencega disintegrasi nasional (Widiatmaka et al., 2021; Adha & Susanto, 2020). Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kerukunan ditengah masyarakat majemuk dapat terjaga (Widiatmaka, 2021).

Sejalan dengan krangka konseptual Pancasila, sikap toleransi antarsesama menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni sosial (Widiatmaka, 2021). Toleransi beragama digambarkan sebagai simbol peradaban yang mutlak diperlukan untuk kehidupan bersama (Walzer, 1997). Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, sebagaimana dipraktikan oleh sebagian masyarakat Dayak di Kalimantan, menjaga keharmonisan keluarga walaupun anggotanya memiliki agama yang berbeda (Widiatmaka et al., 2022). Nilai toleransi ini penting untuk mencegah konflik sosial dan memelihara persatuan di masyarakat beragam.

Namun kenyataannya, praktik toleransi masih menghadapi tantangan serius. Pluralitas agama di Indonesia kadang belum menghasilkan kerukunan; sebaliknya, memicu konflik sosial (Nuryadi & Widiatmaka, 2022). Wacana toleransi dan pluralisme yang gencar digaungkan di kalangan elit intelektual dan birokrasi belum sepenuhnya meresap di tingkat akar rumput (Ma'rif, 2009). Akibatnya, nilai toleransi belum mengakar secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat majemuk; sikap eksklusif dan prasangka terhadap pemeluk agama lain masih sering muncul.

Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah dan masyarakat Jawa Timur menetapkan beberapa daerah sebagai “Desa Pancasila”, termasuk Desa Wonorejo di Kecamatan Banyuputih, Bondowoso (Armawi, 2019). Desa ini diharapkan menjadi percontohan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat multikultural (Armawi, 2019). Namun, observasi awal menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan: dukungan masyarakat terhadap program desa ini belum maksimal, ketergantungan pada kebijakan pemerintah masih tinggi, dan interaksi sosial antarpemeluk agama setempat belum sepenuhnya harmonis. Kondisi tersebut menjadi latar belakang penting bagi penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola perilaku masyarakat serta peran aktor lokal dalam mewujudkan praktik toleransi di Desa Wonorejo, mengungkap kendala dan solusi yang ditemui dalam penerapannya, serta menganalisis implikasi praktik toleransi tersebut terhadap ketahanan ideologi Pancasila di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini memberikan kpntribusi nyata dalam memperkuat nilai-nilai toleransi serta menjaga keutuhan bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila. (Armawi, 2019).



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik toleransi beragama, pola perilaku masyarakat, serta peran aktor lokal dalam kehidupan masyarakat multikultural. Penelitian dilakukan di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang ditetapkan sebagai Desa Pancasila. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi dengan informan kunci yang terdiri atas aparat desa dan tokoh masyarakat lintas agama. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014), serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Toleransi

Secara komseptual, istilah toleransi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan berbagai konsep lain, seperti intoleransi, ekspansi, mayoritas-minoritas, dialog lintas agama, serta pluralisme agama yang semuanya merupakan nagian integral yang ada dalam dinamika social umat lintas agama. Secara bahasa, term toleransi berasal dari Bahasa latin, “*tolerance*” yang memiliki makna membiarkan pihak lain yang memiliki pandangan atau sikap lain tanpa dihalang-halangi.

Toleransi sebenarnya tidak bermakna bahwa seseorang harus melepaskan keyakinan agamanya demi bisa bergaul dan berinteraksi dengan umat agama lain yang berbeda. Toleransi berarti mengizinkan perbedaan itu tetap ada dan tidak memaksa yang berbeda menjadi sama. Toleransi semacam ini akan menjadi pembuka jalan bagi terwujudnya kebebasan dalam beragama. Namun demikian, setiap pemeluk agama akan mengekspresikan kebebasannya secara bertanggung jawab. Toleransi sama sekali tidak dapat dimaknai sebagai sebuah sikap yang pasif yang menerima apa adanya.

Oleh sebab itu, toleransi tidak membenarkan seseorang untuk merelatifkan keyakinan-keyakinannya, apalagi sampai terjebak pada relativisme. Dalam konteks ini, toleransi memberi ruang kepada seseorang untuk belajar tentang kepercayaan-kepercayaan lain, mendengarkannya dengan terbuka, tanpa harus memeluk kepercayaan itu. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, yang kemudian secara teknis disebut dengan istilah toleransi beragama, berarti suatu sikap menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan seseorang. Dalam perspektif sosiologi, pengertian toleransi sering dimaknai sebagai bentuk akomodasi tanpa direncanakan, karena adanya watak perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan.

Secara umum, toleransi terbagi menjadi dua kategori: toleransi pasif dan toleransi aktif. Toleransi pasif yaitu sikap membiarkan pemeluk agama lain mengekspresikan keyakinannya tanpa hambatan. Sementara itu, toleransi aktif adalah sikap saling membantu antarumat beragama dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing. (Antoni, 2002)

Toleransi yang diharapkan adalah toleransi positif, yaitu keterbukaan dan kejujuran dalam mengekspresikan identitas keagamaan tanpa menutupi keberbedaan. Berbeda dengan toleransi



negatif yang semu dan hanya menjaga harmoni di permukaan, toleransi positif memungkinkan tiap pemeluk agama tetap otentik dalam keyakinannya. Inilah bentuk toleransi yang menjadi fondasi kehidupan beragama yang damai dalam masyarakat multikultural.

Secara makna, toleransi adalah manifestasi hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman yang ada. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan toleransi beragama mengalami dinamika, pasang surut, naik turun, yang seringkali diwarnai oleh pemahaman distingtif yang bertumpu pada relasi mereka¹ dan kita, mayoritas² dan minoritas. Dalam kategori yang nyaris sama, menyebut dua jenis toleransi, yakni toleransi formal dan toleransi material. Lebih jauh, mengatakan, Toleransi formal berarti membiarkan saja pandangan-pandangan dan praktik praktik politik atau agama yang tidak sesuai dengan pandangan kita sejauh itu tidak mengganggu. (Yewangoe, 2009)

Konsep Toleransi

Jika dibuat ibarat, demokrasi dan toleransi adalah seperti dua sisi berbeda dari keping uang yang sama. Satu sama lain saling melengkapi dan menggenapkan. Jika salah satu dari keduanya tiada, maka lenyap pula kekuatan yang satunya. Demokrasi tanpa toleransi akan memunculkan situasi yang barbar dan otoritarianistik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan toleransi semu yang rentan memunculkan konflik-konflik. Dalam hal demikian, dibutuhkan barometer atau tolok ukur untuk melihat sampai mana toleransi dan intoleransi dipraktikkan dalam kehidupan sebuah Negara. Untuk melihat toleransi, menurut Misrawi, (Misrawi) ada sejumlah level toleransi dari yang paling bawah sampai tingkatan toleransi yang paling tinggi.

1. hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu sama lain (coexistence). Ini adalah level toleransi yang paling bawah, di mana masing-masing pihak dapat hidup secara damai meskipun di antara mereka tidak saling mengenal.
2. hadirnya kesadaran dan keterbukaan untuk melihat pemeluk agama berbeda sebagai sesama warga negara dan makhluk Tuhan yang mempunyai kesempatan sama di depan hukum (awarness). Keterbukaan dan kesadaran semacam ini merupakan konsekuensi logis dari tumbuhnya kesadaran perihal pentingnya toleransi Level ini dipandang lebih baik dari koeksistensi, karena telah menumbuhkan keterbukaan terhadap kelompok lain yang berbeda.
3. pengenalan terhadap pemeluk agama yang berbeda sambil melakukan dialog konstruktif (mutual learning). Pada praktiknya, pengenalan dapat dipandang sebagai fase amat penting dalam mewujudkan toleransi, hal itu tidak lain karena toleransi pada tahap awalnya dimulai dengan pengenalan yang bersifat holistik terhadap pihak atau kelompok yang berbeda.
4. pemahaman atas kelompok lain (understanding). Langkah ini juga merupakan salah satu tahapan dalam toleransi, karena tidak mungkin kehidupan yang damai dan toleran terbangun tanpa pemahaman terhadap kelompok lain. Institusi pendidikan dan lembaga-lembaga berbasis masyarakat memiliki tanggung jawab dan peran yang besar untuk membangun kesepahaman, sehingga tercipta kesepahaman di antara berbagai kelompok.
5. penghormatan dan pengakuan terhadap kelompok lain (respect). Terkait toleransi, apresiasi dan penghormatan terhadap grup atau kelompok lain yang berbeda dipandang sebagai barometer untuk melihat sejauh mana setiap warga bisa memahami pentingnya kehidupan bersama yang damai, toleran dan saling menghormati.



6. penghargaan pada persamaan dan perbedaan, serta merayakan kemajemukan (value and celebration). Dalam masyarakat yang plural seperti halnya di Indonesia, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan. Hanya saja, di antara berbagai kelompok yang berbeda tersebut menyimpan persamaan yang dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik dan terhormat. Secara demikian, toleransi mengandaikan adanya penghargaan terhadap perbedaan dan persamaan.

Untuk melihat realitas intoleransi dalam sebuah masyarakat, juga menggunakan enam barometer.

1. penolakan atas status dan akses yang sama terhadap kelompok lain yang berbeda.
2. pandangan dan sikap yang menganggap kelompok lain lebih rendah dari diri atau kelompoknya (de-humanization). Secara demikian, dapat dikatakan bahwa dehumanisasi pada dasarnya merupakan sebuah bentuk intoleransi beragama yang sangat serius, karena salah satu nilai terpenting dalam toleransi yakni kesetaraan menjadi terabaikan.
3. pengabaian hak-hak sipil, politik, dan ekonomi (opression). Pemerintahan atau rezim yang represif atau otoritarianistik cenderung melakukan tindakan yang mengabaikan atau bahkan mencederai hak-hak sipil.
4. pengabaian hak-hak sipil, politik, dan ekonomi (opression). Pemerintahan atau rezim yang represif atau otoritarianistik cenderung melakukan tindakan yang mengabaikan atau bahkan mencederai hak-hak sipil.
5. pengorganisasian pembunuhan massal (mass violence). Dapat dikatakan bahwa salah satu bentuk pembunuhan masal yang populer untuk konteks zaman sekarang adalah munculnya fenomena terorisme.
6. pembasmian atas dasar identitas (genocide). Apa yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap kalangan Yahudi di Jerman merupakan salah satu bentuk pembasmian terhadap identitas tertentu. Pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, biasanya netralitas negara bukanlah sesuatu yang taken for granted. Ia harus senantiasa diupayakan terus-menerus. Pada titik itulah dibutuhkan civil religion atau agama sipil. Civil religion merupakan sekumpulan nilai dan norma yang dihasilkan dari agama-agama yang ada untuk menjamin suatu kehidupan bersama yang lestari dalam suasana masyarakat yang plural, semacam kontak sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara atau politik dengan agama berperan sebagai kekuatan perekat bagi pertanggungjawaban hati nurani masyarakat. Karena itu, setiap agama yang ada dalam sebuah negara dapat memenuhi fungsi yang sama.

Pembasmian atas dasar identitas (genocide). Apa yang dilakukan oleh rezim Nazi terhadap kalangan Yahudi di Jerman merupakan salah satu bentuk pembasmian terhadap identitas tertentu. Pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, biasanya netralitas negara bukanlah sesuatu yang taken for granted. Ia harus senantiasa diupayakan terus-menerus. Pada titik itulah dibutuhkan civil religion atau agama sipil. Civil religion merupakan sekumpulan nilai dan norma yang dihasilkan dari agama-agama yang ada untuk menjamin suatu kehidupan □dalam□ yang □dalam□ dalam suasana □dalam□kat yang plural, semacam kontak □dalam dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara atau politik dengan agama berperan sebagai kekuatan perekat bagi



pertanggungjawaban hati □dalah □dalah□kat. Karena itu, setiap agama yang ada dalam sebuah negara dapat memenuhi fungsi yang sama. (Nuryadi, 2020)

Masyarakat secara sosiologis merupakan komponen penting terbentuknya desa. Pola perilaku □dalah□kat umumnya menjadi cerminan keberlangsungan kehidupan suatu Desa. Praktik toleransi yang berlangsung di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur merupakan role model atas keberagaman agama □dalah□kat di Indonesia. Desa tersebut memiliki keberagaman etnis dan juga agama, namun keberagaman tersebut tidak menghalangi untuk bekerja sama atau gotong royong dan saling tolong menolong antar □dalah, meskipun memiliki perbedaan agama dan etnis. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mendirikan, menjaga dan melestarikan desa wisata kebangsaan yang secara resmi diresmikan pada tahun 2015.

Selain itu, tidak pernah terjadi konflik antar agama atau antar perbedaan di desa tersebut. Kepala desa Wonorejo juga menyatakan bahwa Desa Wisata Kebangsaan didirikan atas dasar kerukunan antar umat beragama, saling bergotong royong dan saling tolong menolong, sehingga tidak pernah terjadi konflik antar perbedaan di desa. Saling menghormati antar pemeluk agama atau mengedepankan toleransi menjadi kunci utama terjalinnya keharmonisan di desa tersebut. Tidak dipungkiri bilamana desa tersebut menjadi pusat percontohan kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur. Fenomena tersebut sejalan terkait konsep toleransi yang diungkapkan oleh Fitriani, di mana kunci utama di dalam □dalah□kat yang majemuk □dalah mengedepankan sikap toleransi. (Fitriani, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa menunjukkan bahwa pola perilaku masyarakat yang toleran tercermin dalam beberapa hal yakni:

1. Menjauhkan topik agama dalam komunikasi sehari-hari.
2. Gotong royong dalam membangun tempat ibadah
3. Penggunaan atribut agama saat hajatan atau kegiatan keagamaan lain.
4. Kerukunan dalam lingkup keluarga yang berbeda agama, dan
5. Sikap menghargai atas berlangsungnya hari besar maupun acara kebudayaan antar agama.

Salah satu pola masyarakat yang gotong royong tercermin di masa pandemi dengan melakukan pembersihan tempat ibadah dari masing-masing agama (masjid, pura, dan gereja) tanpa memunculkan egoisme dalam beragama. Kehidupan toleransi yang mencolok di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur ialah berdirinya tempat ibadah agama Islam, Kristen, dan Hindu yang berjarak dekat ± 200 meter. Pandemi Covid-19 memperkuat masyarakat Desa Sukoreno untuk saling bergotong royong membuat lingkungan mereka tetap aman, salah satunya melakukan penyemprotan desinfektan yang dilakukan antarmasyarakat tanpa membedakan agama. Kehidupan masyarakat selama masa pandemi Covid-19 mengalami banyak perubahan yang tak terelakkan. Dalam kehidupan sosial, pola masyarakat yang toleran tentu menjadi harapan atas keberlangsungan umat beragama. Sikap gotong royong, saling menghargai, tolong menolong, rukun, hingga ritual kepercayaan dapat dimaknai sebagai bentuk pewarisan nilai-nilai tradisi di masyarakat yang secara sadar turun temurun dipertahankan dari generasi ke generasi berikutnya. Agar pola masyarakat ini tetap bertahan, pengarus utamaan perilaku harus didasarkan pada nilai-nilai transendental yang berasal dari adat istiadat, agama, serta nilai-nilai lokal. (Hindaryatiningsih, 2016)



Pola perilaku masyarakat di Desa Pancasila selalu menekankan keharmonisan kehidupan bersama, meskipun memiliki perbedaan latar belakang. Selain itu, kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat terjalin dengan baik dalam membangun keharmonisan antar sesama, meskipun memiliki perbedaan latar belakang. Hal tersebut harus dijaga dan dirawat dengan baik dan maksimal serta menjadi pusat percontohan bagi desa atau daerah lainnya. Konstruksi Desa Pancasila tidak luput dari keterlibatan para aktor lokal, antara lain pejabat pemerintahan setempat, pemangku agama, maupun masyarakat yang terkait. Terlebih dengan mengusung konsep desa wisata Pancasila, beberapa wilayah ini menampilkan karakteristik yang khas atas predikat tersebut. Perlu diketahui tujuan dibentuknya desa wisata mengarah pada dua hal, yaitu membangun perekonomian negara, sekaligus menjalankan fungsi edukasi dan meningkatkan ketahanan sosial budaya. (Prameswari, 2018)

Perkembangan konsep desa tangguh sebagai respon atas percepatan pembangunan desa di masa pandemi berupaya mempertahankan keberlangsungan produktivitas suatu desa. Konsep desa tangguh terdiri dari beberapa kategori, yaitu desa kreatif, desa peduli, desa hijau, desa pintar, dan desa sehat. Konsep desa tangguh tidak hanya terbatas pada aktivitas penanganan dan pencegahan, namun inovasi dan produktivitas tetap dibutuhkan di masa pandemi Covid-19. (satria, 2020) Merespon kebijakan ini, sekaligus mengidentifikasi terwujudnya Desa Pancasila, keterlibatan masyarakat lokal ialah aspek penting sebab sumber daya dan karakter tradisi maupun budaya ialah unsur penggerak terbentuknya desa tersebut. (Dewi, 2013)

Kehidupan toleransi antar pemeluk agama merupakan karakteristik utama atas terwujudnya Desa Pancasila di masing-masing wilayah. Strategi memelihara kerukunan antar umat beragama di Desa Pancasila penting dilakukan melalui pengkodisian tertentu. Proses habituasi dimaknai sebagai proses pengkodisian masyarakat, pembiasaan dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga menjaga pola harmonisasi antar umat beragama. Habituasi menginternalisasi nilai nilai yang diciptakan oleh praktik maupun tindakan, sekaligus merupakan hasil dari praktik atau tindakan yang diciptakan oleh kehidupan sosial. (Nurhakki, 2021)

Habituasi ini tampak dari prinsip 'Bedo raginyo, sing penting rukun' yang berarti walaupun berbeda, namun tetap rukun dalam konsep kerukunan masyarakat di Desa Balun, Kabupaten Lamongan menggambarkan pewarisan nilai toleransi yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. Gagasan lokal ini sejalan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. (Alfariz, 2021) Selanjutnya, terintegrasinya pendidikan toleransi di berbagai jenjang sekolah. Sebagaimana di tiga wilayah Desa Pancasila, penanaman nilai-nilai toleransi seperti sikap saling menghormati, tolong menolong, hidup rukun dan berdampingan antar umat beragama menjadi bagian dari berlangsungnya pembelajaran. Hal ini dimulai dari jenjang TK hingga SMA sederajat. Pemerintah desa sebagai aktor lokal memiliki berperan penting dalam mewujudkan kehidupan toleransi di Desa Pancasila. Terlebih di masa pandemi, pemerintah desa bertanggungjawab atas terpeliharanya kerukunan antar umat beragama. Termasuk menjalin koordinasi dengan masyarakat lintas agama untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran Covid-19 melalui upaya kesehatan, seperti penjagaan posko Covid-19, penyemprotan desinfektan, pembersihan lingkungan tempat ibadah, hingga berlangsungnya upacara keagamaan. Selanjutnya pemuka agama merupakan figur yang dipercaya oleh pemeluk agama bertanggung jawab pada internalisasi nilai nilai universal dan humanis ke dalam hati dan nurani, sehingga toleransi tidak hanya dimaknai sebagai suatu hal yang semu. Agama menjadi sumber pedoman, etika kehidupan



yang menggerakkan masyarakat untuk berperilaku jujur, adil, bijaksana, serta menjauhkan diri dari berbagai perilaku merusak harmonisasi antar umat beragama. (Zainuri, 2020)

Pemerintah desa di sini selalu mengadakan kegiatan musyawarah (rembuk desa) untuk meminimalisir timbulnya suatu konflik dan berusaha untuk mengakomodir masyarakat untuk saling membantu meskipun memiliki perbedaan latar belakang khususnya agama. Pemerintah desa selalu mengajak kerja sama kepada masyarakat untuk selalu saling tolong menolong atau gotong royong demi mewujudkan Desa Pancasila yang aman dan tangguh serta menekankan praktik kehidupan yang penuh dengan toleransi. (Calvina, 2015)

Kendala yang Dihadapi dalam Praktik Kehidupan Toleransi Kehidupan toleransi pada umumnya mampu membawa masyarakat dalam situasi yang kondusif. Namun dalam praktiknya, untuk mencapai situasi tersebut tentu tidak luput dari berbagai permasalahan yang menjadi kendala mewujudkan masyarakat cinta damai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di tiga wilayah Desa Pancasila Jawa Timur ditemukan beberapa kendala dalam praktik bertoleransi, antara lain:

1. Munculnya sikap sinisme dalam beribadah.
2. Adanya konflik keluarga terkait perbedaan agama, dan
3. Terbatasnya upacara perayaan keagamaan.

Sikap sinisme dimungkinkan muncul pada kondisi masyarakat yang memiliki keragaman tertentu, dalam kasus ini berkaitan dengan agama. Penelitian ini menunjukkan bahwa wujud sinisme umumnya dialami oleh masyarakat pendatang yang belum beradaptasi dengan kehidupan agama lain. Pada studi ini ditemukan beberapa masyarakat dari agama Islam belum terbiasa dengan material ibadah agama Hindu, salah satunya kemenyan. Kemenyan yang memiliki karakteristik dengan bau yang sangat wangi dan menyengat membuat beberapa masyarakat agama Islam merasa tidak nyaman, terlebih ketika mereka sedang melakukan ibadah di masjid. Selain tidak nyaman, bau kemenyan pun dinilai membuat salat Masyarakat agama Islam terganggu, sehingga mereka tidak dapat berkonsentrasi (khusyu'). Studi lapangan di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur ditemukan bahwa perbedaan agama dalam keluarga satu rumah dapat menjadi penyebab konflik keluarga. Hal ini dialami oleh keluarga Bapak Sukir dan Ibu Muntani. Keputusan pindah agama karena menikah dari salah seorang anggota keluarga membuat Bapak Sukir dan Ibu Muntani tidak setuju. Perbedaan pandangan mengenai agama inilah menjadi pemicu adanya konflik keluarga.

Di masa pandemi Covid-19, beberapa upacara keagamaan di Desa Pancasila seperti perayaan agung Nyepi, Pawai Ogoh-Ogoh, maupun perayaan Paskah yang biasanya melibatkan masyarakat lintas agama harus terhenti. (Kafid, 2015) Upacara keagamaan tersebut berlangsung secara tertutup dan terbatas diikuti oleh umat agama terkait. Pemerintah setempat mengakomodir keberlangsungan upacara agama tersebut dengan memberikan kebijakan untuk mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Sebagaimana kendala tersebut, sikap sinisme antar umat beragama maupun perbedaan agama dalam satu rumah berpotensi terhadap keberlangsungan kehidupan toleransi. Berawal dari sinisme dapat mendatangkan sikap intoleransi. Pernyataan ini sesuai dengan pandangan Kafid yang menjelaskan bahwa pada level tertentu sinisme dapat mendatangkan perpecahan umat. (Kafid, 2015)



Berdasarkan pandangan sosiologis, penelitian Yuliana (2014) berjudul “Pernikahan Orang Tionghoa dan Suku Mandar” menunjukkan fenomena perkawinan beda agama seperti halnya dialami oleh keluarga Bapak Sukir merupakan bentuk persilangan budaya (cross culture). Apabila diidentifikasi perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan eksogami yang terjadi karena adanya keterbukaan dan cara berpikir yang luwes untuk menerima pasangan yang berbeda agama. Walaupun dalam praktiknya upaya perkawinan beda agama seringkali menimbulkan permasalahan, salah satunya kurang penerimaan dari keluarga. (Yusuf, 2015) Permasalahan lain yang sering muncul diantaranya ialah:

1. Munculnya ketegangan antar umat beragama tentang bagaimana menangani masalah anggotanya yang menikah, sehingga mengganggu bentuk bentuk kerja sama ekumenis.
2. Pasangan beda agama menghadapi penilaian tradisi dari agama masing-masing, dan
3. Pasangan yang menikah bertanggung jawab menavigasi tradisi mereka, meskipun tidak sepenuhnya berjalan mulus. (Mehta, 2020)

Padahal dorongan pernikahan beda agama menunjukkan potret toleransi dan penerimaan antar pemeluk beragama, sehingga memungkinkan interaksi dengan latar belakang individu yang berbeda (Duvall & Miller, 1985). Hal ini dikuatkan dengan pendapat Saputra (2018), di mana mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama menjadi 4 yaitu: (Miles)

1. Keinginan mendirikan tempat ibadah tanpa memperhatikan jumlah penduduk agama setempat, sehingga menyinggung perasaan umat beragama yang mayoritas di daerah itu,
2. Menggunakan mayoritas sebagai sarana penyelesaian sehingga menimbulkan masalah.
3. Perkawinan beda agama, dan
4. Makin bergesernya pola hidup berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong ke arah kehidupan individualistik. Kendala tersebut harus segera diantisipasi agar tidak menjadi bom waktu, sehingga keharmonisan kehidupan di desa Pancasila dapat terjaga dan terawat dengan baik, sehingga menjadi pusat percontohan kehidupan yang toleransi dan harmonis di Indonesia.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang menjadi anugerah sekaligus tantangan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Dalam kontes ini, paradigma Aswaja sebagai konsep keberagaman moderat berperan penting dalam membangun toleransi inklusif, dialogis, dan humanis. Temuan lapangan di Desa Pancasila menunjukkan bahwa masyarakat mampu menjaga keharmonisan ditengah perbedaan keyakinan melalui praktik gotong royong, saling membantu, menghargai perayaan keagamaan, serta saling menghormati, termasuk dalam keluarga beda agama.

Praktik toleransi tersebut didukung oleh peran pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga pendidikan yang secara konsisten menanamkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi yang berkembang bersifat aktif dan positif, tidak sekadar membiarkan perbedaan, tetapi juga mendukung pelaksanaan keyakinan masing-masing agama. Meskipun masih menghadapi kendala seperti sinisme, konflik keluarga, dan pembatasan perayaan keagamaan, penerapan nilai-



nilai Pancasila terbukti memperkuat integrasi sosial dan ketahanan ideologi bangsa. Olehkarena itu, praktik toleransi beragama di masyarakat muktikultural perlu terus dijaga, diwariskan kepada generasi berikutnya, dan jadikan model bagi daerah lain demi terwujudnya persatuan dan perdamaian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Yewangoe, —Regulasi Toleransi Dan Pluralisme Agama Di Indonesia Dalam Taher, Elza Peldi (Ed.). Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi. (Jakarta: Kompas dan ICRP, 2009), hlm. 78.
- Calvina, C., & Yusuf, E. A., 2015, “Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama”, *Predicara*, Vol 2 No.1, hh. 160497.
- Kafid, N., 2015, “Agama di Tengah Konflik Sosial: Tinjauan Sosiologis atas Potensi Konflik Keberagaman Agama di Masyarakat”. *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, Vol. 12 No.1, hlm. 1–13.
- Mehta, S. K., 2020, “Christmas in the Room: Gender, Conflict, and Compromise in Multi- Religious Domestic Space”. *Religions*, Vol. 11 No. 6, hlm. 281.
- Miles, Huberman & Saldana, J., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.), Jakarta: SAGE Publications.
- Nuryadi, M. H., Zamroni, & Suharno, 2020, “The pattern of the teaching of multiculturalism- based civics education: A case study at higher education institutions”. *European Journal of Educational Research*, Vol. 9 No. 2, hlm. 799–807.
- Wajihuddin, W., 2021, “Analisis Ketahanan Ideologi Pancasila Generasi Milenial Di Sman Wilayah Kota Kabupaten Jember”. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No.2, hlm. 782–793.
- Widianto, E., 2019, *Toleransi untuk Salat Idul Adha*, Gereja Malang Tiadakan Misa Pagi.
- Widiatmaka, P., 2021, “Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Karakter Pancasila di Perguruan Tinggi”. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol.1 No.2, hlm. 176–185.
- Widiatmaka, P., Purwoko, A. A., & Shofa, A. M. A. , 2022, “Rumah Radakng dan Penanaman Nilai Toleransi di Masyarakat Adat Dayak”. *Dialog*, Vol. 45 No.1, hlm. 57–68.
- Widiyowati, E., Kriyantono, R., & Prasetyo, B. D., 2018, “Dialog dan Mediasi: Perspektif Komunikasi Konflik Dalam Strategi Manajemen Konflik”, *Channel*, Vol.6 No.1, hlm. 33–46.
- Zainuri, A., 2020, *Narasi Perdamaian Membangun Keharmonisan Antar Pemeluk Agama di Indonesia*, Batu: CV Prabu Dua Satu.